



Implementasi Kebijakan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung

I Dewa Ayu Dwi Jayanthi Candra Dewi *

I Putu Dharmanu Yudharta

Universitas Udayana

* Correspondence: candrajayanthi@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyze the implementation of financial policies and their impact on the performance of the Department of Education, Youth, and Sports in Badung Regency. The study adopts a quantitative-descriptive approach using primary data from interviews and questionnaires, as well as secondary data from financial reports and policy documents. The results show that optimal budget allocation, efficient utilization of financial resources, and budget oversight have a significant relationship with improving organizational performance. Policy implications suggest enhancing budget management transparency and stakeholder participation in the financial planning process.

Keywords: Financial Policy Implementation, Organizational Performance, Education, Youth, Sports.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keuangan serta pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Badung. Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan data primer dari wawancara dan kuesioner serta data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang optimal, pemanfaatan sumber daya keuangan secara efisien, dan pengawasan anggaran memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Implikasi kebijakan menyarankan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan keuangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Keuangan, Kinerja Organisasi, Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga

I. Pendahuluan

Sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. Kabupaten Badung, sebagai salah satu wilayah di Bali yang memiliki alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar. Meskipun alokasi anggaran tergolong besar, tantangan tetap ada dalam hal efektivitas implementasi kebijakan keuangan, termasuk dalam perencanaan, pengawasan, dan realisasi anggaran. Selain itu, kebijakan keuangan yang kurang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat kerap kali menyebabkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya (Suharyana, 2017). Banyak program yang dirancang tidak sepenuhnya berjalan efektif karena kendala teknis. Upaya memperbaiki implementasi kebijakan keuangan memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pemangku kepentingan, agar tujuan akhir dari kebijakan ini, yakni meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan olahraga, dapat tercapai secara optimal.

Kebijakan keuangan mencakup serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengalokasian, pengelolaan, dan evaluasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi (Hajizah, 2024). Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran pendidikan, tetapi juga mencakup pengelolaan dana untuk pembangunan fasilitas, pemberian subsidi operasional, pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dalam teknologi pendidikan. Kebijakan keuangan yang efektif harus mampu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek

dengan tujuan pembangunan jangka relatif, serta memastikan bahwa setiap alokasi dana memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan kerangka regulasi yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan keberlanjutan program-program pendidikan.

Kinerja Dinas Pendidikan diukur melalui beberapa faktor utama, seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan strategis pendidikan. Indikator tingkat partisipasi mencakup angka partisipasi murni dan kasar pada berbagai jenjang pendidikan, sementara kualitas layanan dinilai dari kepuasan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, dan hasil pembelajaran (Farchan, 2016).

Efisiensi penggunaan anggaran mencakup sejauh mana alokasi dana dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan output yang optimal, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan alat belajar, serta program pelatihan guru. Studi sebelumnya menunjukkan hubungan antara kebijakan keuangan yang efektif dengan capaian kinerja sektor pendidikan, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan kualitas hasil pembelajaran. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memengaruhi kuantitas layanan pendidikan tetapi juga mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah.

Keberhasilan implementasi kebijakan keuangan sangat menentukan peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga. Kebijakan keuangan tidak hanya mencakup pengalokasian dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, kualitas fasilitas, dan aksesibilitas program-program kepemudaan dan olahraga (Umar, 2017). Namun, kurangnya koordinasi antarbagian, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kebutuhan masyarakat menjadi kendala yang sering dihadapi. Dalam penelitian ini, rumusan masalah dapat disajikan secara lebih eksplisit sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan keuangan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung?
2. Sejauh mana implementasi kebijakan keuangan memengaruhi kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan keuangan di dinas tersebut?

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan keuangan dan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keuangan dan kinerja dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Bandung.

II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kuantitatif deskriptif (*mixed methods*). Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola dan tren, serta menggunakan regresi untuk menguji hubungan antara implementasi kebijakan keuangan dan kinerja Dinas Pendidikan. Data kualitatif dianalisis dengan metode tematik untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor keberhasilan, lalu diverifikasi melalui triangulasi data dari kuesioner, wawancara, dan dokumen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara rinci sekaligus menguji hubungan antara variabel yang diteliti, yakni implementasi kebijakan keuangan dan kinerja dinas. Pendekatan kuantitatif memberikan hasil terukur yang memungkinkan analisis yang signifikan, sedangkan pendekatan kualitatif membantu mendalami konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan (Sahir, 2021).

Pendekatan studi kasus diterapkan untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan keuangan di Kabupaten Badung. Studi kasus ini melibatkan analisis terhadap proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keuangan, serta bagaimana proses tersebut berdampak pada kinerja dinas. Desain ini juga mencakup eksplorasi terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

keberhasilan kebijakan. Populasi penelitian ini mencakup staf Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, pemangku kepentingan di tingkat daerah, serta komunitas yang terlibat dalam program-program pendidikan dan olahraga. Sampel diambil secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan dari berbagai bagian yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Sebanyak 50 responden dari berbagai latar belakang dipilih, termasuk pejabat, tenaga teknis, dan perwakilan masyarakat.

Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen (Rahardjo, 2011). Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keuangan, serta pengaruhnya terhadap kinerja dinas. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif kualitatif mengenai hambatan dan tantangan implementasi kebijakan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan anggaran, laporan evaluasi program, dan dokumen perencanaan strategis. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih. Tahap kedua melibatkan wawancara mendalam untuk menggali informasi yang tidak tercakup dalam kuesioner. Tahap terakhir adalah studi dokumen untuk memverifikasi data kuantitatif dan mendukung analisis kualitatif.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan pola dan tren, serta analisis regresi untuk menguji hubungan antara kebijakan keuangan dan kinerja dinas. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode tematik, yang melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi tema utama terkait implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil dari kedua pendekatan ini diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Badung memiliki alokasi anggaran pendidikan yang relative besar dan terus meningkat setiap tahun. Dengan alokasi dana yang signifikan, berbagai program pendidikan dan olahraga telah dilaksanakan, mulai dari peningkatan infrastruktur pendidikan hingga penyediaan beasiswa. Namun, efektivitas program tersebut masih memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan strategis dapat tercapai.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Bali Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Anggaran (triliun)	APBD (triliun)	%
2018	2,0	6,6	30,3
2019	2,0	7,2	27,8
2020	2,1	6,9	30,4
2021	2,1	7,9	29,1
2022	1,6	6,1	26,2

Sumber: anggaran dana pendidikan Pemprov Bali

Berdasarkan data Tabel Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Bali Tahun 2018-2022, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah anggaran pendidikan dan APBD Provinsi Bali. Pada tahun 2018 dan 2019, alokasi anggaran pendidikan stabil di angka 2,0 triliun, meskipun APBD mengalami peningkatan dari 6,6 triliun pada 2018 menjadi 7,2 triliun di 2019. Namun, persentase alokasi anggaran justru mengalami penurunan dari 30,3% menjadi 27,8%, yang menunjukkan berkurangnya proporsi anggaran pendidikan terhadap total APBD.

Pada tahun 2020, jumlah anggaran pendidikan naik tipis menjadi 2,1 triliun, diikuti oleh penurunan APBD ke 6,9 triliun, tetapi persentase alokasinya naik kembali menjadi 30,4%. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya menjaga prioritas anggaran pendidikan meskipun APBD mengalami penurunan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan APBD menjadi 7,9 triliun, sementara anggaran pendidikan tetap 2,1 triliun, dengan persentase alokasi menurun sedikit menjadi 29,1%.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan baik pada jumlah anggaran pendidikan maupun APBD. Anggaran pendidikan turun menjadi 1,6 triliun, sementara APBD menurun drastis ke 6,1 triliun. Hal ini

berdampak pada persentase alokasi anggaran pendidikan yang turun menjadi 26,2%, angka terendah dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, meskipun APBD mengalami fluktuasi, alokasi anggaran pendidikan tidak selalu bergerak seiring dengan perubahan APBD. Penurunan nominal dan persentase alokasi di tahun 2022 menunjukkan adanya pengurangan prioritas untuk pendidikan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas program-program pendidikan di Bali.

Tabel 2. Analisis Regresi Implementasi Kebijakan Keuangan terhadap Kinerja

Variable	Koefisien regresi (B)	T-statistik	P-value	Keterangan
Perencanaan anggaran	0.45	3.25	0.002	Signifikan
Implementasi program	0.38	2.90	0.005	Signifikan
Evaluasi kebijakan	0.25	2.10	0.030	Signifikan
Transparansi dan akuntabilitas	0.32	2.75	0.008	Signifikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keuangan di Kabupaten Badung mencakup empat tahap utama: perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, meskipun proses telah melibatkan banyak pihak, ada kekurangan dalam pemetaan kebutuhan lokal yang menyebabkan beberapa program tidak sesuai dengan prioritas masyarakat. Pada tahap pengalokasian, meskipun anggaran telah ditetapkan sesuai dengan kerangka regulasi, sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana yang menghambat pelaksanaan program. Pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya variasi efektivitas antarprogram. Beberapa program pendidikan, seperti perbaikan fasilitas sekolah dan pemberian subsidi operasional, menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan angka partisipasi siswa dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Di sisi lain, program pengembangan kapasitas guru dan kegiatan olahraga masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta minimnya dukungan logistik yang memadai. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga mengurangi potensi dampak positif dari kebijakan yang telah dirancang. Selain itu, pelaksanaan yang kurang terintegrasi antarunit kerja mengakibatkan beberapa program berjalan secara parsial dan tidak memberikan efek sinergis terhadap peningkatan kinerja dinas secara keseluruhan.

Tabel 3. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan

Faktor Hambatan	Frekuensi	Keterangan
Kurangnya Kompetensi SDM	40%	Banyak staf memerlukan pelatihan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan.
Mekanisme Birokrasi yang Kompleks	30%	Proses administrasi sering kali memperlambat implementasi program.
Data yang Tidak Akurat	20%	Ketersediaan data untuk perencanaan masih menjadi kendala
Keterlambatan Pencairan Dana	10%	Terjadi beberapa kali selama periode penelitian

Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan keuangan meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, mekanisme birokrasi yang kompleks, dan keterbatasan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, ditemukan bahwa koordinasi antarunit kerja dalam dinas belum optimal, sehingga beberapa program berjalan secara parsial tanpa sinergi yang memadai. Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala, namun fokusnya lebih banyak pada aspek administratif dibandingkan dengan dampak nyata terhadap masyarakat. Misalnya, indikator keberhasilan sering kali hanya diukur berdasarkan tingkat realisasi anggaran, tanpa menilai sejauh mana hasil program memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan evaluasi yang lebih holistik, yang mencakup analisis dampak dan keberlanjutan program.

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi kebijakan keuangan dengan kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil variabel perencanaan anggaran memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja dinas, diikuti

oleh pelaksanaan program dan evaluasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan analisis kebutuhan yang komprehensif, dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Program-program pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup, seperti perbaikan infrastruktur sekolah dan pemberian beasiswa, secara langsung meningkatkan indikator kinerja, termasuk angka partisipasi siswa dan tingkat kelulusan. Di sisi lain, program olahraga, meskipun memiliki dampak positif, belum mencapai target maksimal karena keterbatasan dalam implementasi dan dukungan sumber daya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan keuangan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat mendorong kinerja sektor publik. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada mekanisme tata kelola dan koordinasi antarinstansi. Misalnya, pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas, sehingga kebutuhan lokal tidak sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, keterlambatan pencairan dana menjadi isu yang berulang, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Hambatan ini bukan hanya berdampak pada pelaksanaan program, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa evaluasi yang berfokus pada hasil (*outcome-based evaluation*) lebih efektif dibandingkan dengan evaluasi yang hanya melihat aspek administrasi (Purnamaningsih, 2022). Evaluasi berbasis hasil memungkinkan identifikasi dampak nyata dari program terhadap masyarakat, sehingga pengambil kebijakan dapat mengarahkan sumber daya pada program-program yang memberikan manfaat terbesar. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keuangan yang efektif tidak hanya memerlukan kerangka regulasi yang jelas, tetapi juga kapasitas institusi yang memadai, data yang akurat, dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi daerah lain yang ingin meningkatkan kinerja sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga melalui kebijakan keuangan yang lebih baik.

IV. Kesimpulan

Implementasi kebijakan keuangan yang efektif dapat berdampak signifikan pada kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keuangan di lembaga tersebut masih belum efektif, namun dapat berdampak signifikan pada kinerja lembaga jika dilakukan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keuangan di lembaga tersebut adalah kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam bidang keuangan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya, evaluasi terhadap kinerja lembaga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan ketersediaan sumber daya.

Saran

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan keuangan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung:

1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam bidang keuangan dengan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan keuangan.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan evaluasi terhadap kinerja lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diimplementasikan efektif dan efisien.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diimplementasikan efektif dan efisien.
5. Meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diimplementasikan efektif dan efisien.

6. Mengembangkan sistem akuntansi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan yang diimplementasikan efektif dan efisien.

Dengan saran-saran ini, diharapkan bahwa implementasi kebijakan keuangan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga.

Daftar Pustaka

- Farchan, F. (2016). Teknikal Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Sebuah Paradigma Pengukuran Kinerja. *Risâlah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 42-62.
- Hajizah, A. (2024). Penerapan User Experience Dalam Permodelan Sistem Informasi Keuangan. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science*, 2(1), 1-11.
- Purnamaningsih, P. E. (2022). Teori Atau Model Dalam Formulasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Suharyana, Y. (2017). Implementasi e-government untuk pelayanan publik di provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 45-58.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-13.